

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan dan menyelesaikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah minus dan daerah terbelakang lainnya yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan wawasan nusantara.¹ Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terarah

¹ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerintahan*, Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo, 1996, hal. 336.

dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada masa yang lalu sangat sedikit perhatian ditumpahkan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Terdapat dua alasan penting yang menimbulkan keadaan tersebut. Pertama, terdapatnya keyakinan bahwa perencanaan pembangunan nasional sudah akan mampu menggerakkan ekonomi suatu negara dan berbagai daerah sehingga tidak memerlukan lagi adanya perencanaan pembangunan daerah. Kedua, terdapat anggapan bahwa rencana dan strategi pembangunan daerah merupakan mini rencana dari pembangunan nasional.²

Makin lama makin disadari bahwa dua alasan yang pertama dikemukakan di atas adalah kurang tepat karena ternyata (1) adanya perencanaan pembangunan negara belum menjamin akan terwujudnya pembangunan yang seimbang di berbagai daerah dan (ii) rencana pembangunan daerah bukanlah mini dari rencana pembangunan nasional. Pengalaman program pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa rencana pembangunan nasional belum dapat menciptakan proses rekonsiliasi pembangunan yang efisien ke berbagai daerah. Bahkan di beberapa negara usaha tersebut telah menciptakan ketidakseimbangan pembangunan yang bertambah serius diantara daerah. Oleh karena itu, makin

² Sigit Widodo, *Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, UPN, Skripsi Fakultas Ekonomi, Tak Diterbitkan, Universitas Pembangunan Nasional, 2001, hal 3.

lama makin banyak orang yang berkeyakinan akan pentingnya program pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang bergerak timbal balik. Disatu pihak, rencana pembangunan akan menunjukkan berbagai proyek yang harus dijalankan di suatu daerah dan ini selanjutnya menunjukkan tugas yang harus dipikul oleh pemerintah daerah dalam usaha menciptakan pembangunan nasional. Tetapi di lain pihak, Pemerintah Daerah dapat pula menunjukkan kepada Pemerintah Pusat tentang proyek-proyek yang sebaiknya dilaksanakan di daerah tersebut. Dalam usaha mempertinggi efisiensi perencanaan penyebaran proyek-proyek ke berbagai daerah, Pemerintah Daerah dapat memainkan dua peranan penting. Pertama, perencana daerah haruslah berusaha membantu perencana pusat dalam memberikan data mengenai daerahnya dan menunjukkan potensi yang dimiliki daerah tersebut sebelum proyek pembangunan dilaksanakan. Kedua, adanya partisipasi dalam merencanakan penyebaran proyek-proyek dapat menciptakan suasana yang menjamin penyebaran yang lebih adil atas sumber-sumber daya yang tersedia di berbagai daerah. Dalam menjalankan fungsinya ini perencana daerah dan Pemerintah Daerah haruslah menjaga agar kepentingan dan pembangunan daerahnya tidak dikorbankan demi untuk pembangunan di daerah lain atau dalam mencapai cita-cita pembangunan yang ambisius.³

³ *Ibid*, hal 3-4.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah telah diberi wewenang yang luas kecuali dalam bidang politik luar negeri, mempertahankan pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Otonomi daerah sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 1974 dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang no 5 tahun 1974 lebih banyak menitikberatkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dari pada yang desentralistik. Karena itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah merupakan upaya mereformasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.⁴

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui pemberdayaan sumber daya ekonomi yang dimiliki sendiri merupakan

⁴ Muh. Awal Satrio Nugroho, *Seputar Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Telaah Bisnis*, STIE Widya Wiwaha, 2000, hal. 13.

kebanggaan bagi suatu negara. Demikian halnya bila dilihat dalam konteks pertumbuhan daerah di Indonesia, maka setiap daerah berupaya agar tingkat pertumbuhan yang dicapai selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Agar pembangunan daerah selaras dengan pembangunan nasional, dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral mengacu pada prioritas, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Dalam hal ini, diperlukan juga adanya perencanaan, koordinasi, dan keterpaduan antar sektor, antar sektor dalam daerah dan antar daerah tingkat I, dimana asas Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung karakteristik tiap daerah.⁵

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor dapat menggambarkan seberapa besar keuntungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Laju pertumbuhan yang tidak seimbang antara daerah yang satu dengan daerah yang lain karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, persebaran penduduk, dan tingkat pendapatan daerah. Akibatnya ada daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Keadaan ini tentu memerlukan cara dan

⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, BPSTIE YKPN, 1999, hal. 298.

pembinaan serta penanganan yang berbeda. Perkembangan tingkat perekonomian setiap daerah yang dapat dilihat dari kondisi sektor-sektor ekonomi.

Dengan menganalisis peran masing-masing sektor maka dapat ditentukan sektor basis yaitu sektor yang potensial memberikan kontribusi terhadap tingkat pendapatan suatu daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya informasi mengenai sektor-sektor basis melalui hasil analisis, merupakan input bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pertumbuhan yang terjadi pada sektor ekonomi dalam struktur perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul "Analisis Sektor Basis Dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah" (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1998-2002).

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka di dalam penelitian ini akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan sektor-sektor pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan sektor pembangunan secara nasional.
2. Sektor-sektor pembangunan manakah yang dominan (yang menjadi basis) di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1998-2002.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan sektor perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan sektor sejenis secara nasional.
2. Mengidentifikasi sektor mana yang menjadi basis untuk mempercepat pertumbuhan daerah DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai latihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam masalah pertumbuhan ekonomi daerah dan mendapatkan gelar di UMY.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi (bahan masukan) bagi para pembuat kebijaksanaan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi Pihak lain

Sebagai sumber informasi untuk penelitian serupa dengan analisis yang lebih komprehensif.